

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.P. Parlindungan. 2008. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Ahmad Sodiki. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ali Ahmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan 1*. Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 26.
- Andy Hartanto. 2022. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA. Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Budi Harsono. 2018. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi. dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Effendi Perangin. 1995. *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia.
- I.P.M. Ranuhandoko. 2000. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Kartini Soedjentro 2005. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Maria S.W. Sumardjono. 2014. *Semangat Konstitusi dan Alokasi yang Adil atas Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- Maria S.W. Sumardjono. 2009. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustakan LP3ES.
- Muchsin. *et.al.* *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Bandung: Refika Aditama.
- Notohamidjojo. 1975. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Alumni.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Prosedur Pendaftaran Tanah (Tentang Hak Milik. Hak Sewa guna. Dan Hak Guna Bangunan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetomo. 1981. *Pedoman Jual beli Tanah Peralihan Hak dan Sertipikat*. Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhariningsih. 2009. *Tanah Terlantar. Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Suriyaman Mustari Pide, 2022, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tody Sasmita. *et.al.* 2014. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUU-X/2012; Putusan MK No. 3/PUU-*

VIII/2010. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Urip Santoso. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.

Winahyu Erwiningsih. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia-Total Media.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Agung Syaputra. 2022. *Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Moh. Angga Dwi Fachrul Yahya. 2024. *Analisis Fikih Terhadap Mekanisme Perolehan dan Pengelolaan Tanah di Ibu Kota Nusantara Menurut PERPRES Nomor 65 Tahun 2022*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah menurut UUD 1945*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yudik Darmawan. 2020. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Lahan di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Kecamatan Pujut. Kabupaten Lombok Tengah*. Skripsi. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Muhammadiyah Mataram.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

Aditya Nurahmani. Putrida Sihombing. 2023. *Kajian Kebijakan Pengendalian di Bidang Pertanahan dalam Mencegah dan Memberantas Para Spekulasi dan Mafia Tanah di Ibu Kota Nusantara*. Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 3.

Adrian Fernando Simangunsong. 2023. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Catatan Menurut Teori keadilan Sosial John Rawls*. Jurnal Pertanahan Vol. 13 No. 1.

- Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim. 2019. *Problematis Definisi Harta Pailit Untuk mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.6. No.2.
- Agustina, 2015, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, Masalah-masalah Hukum, Vol. 5 No. 1
- Akhmad Safik. Mira Ewinda. 2023. *Pengelolaan Tanah di Ibu Kota Negara IKN*. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al-Azhar Indonesia Vol. 01 No. 08.
- Andika Hendra Mustaqim. 2022. *Mengonstruksi Masa Depan Indonesia: Situasi Retorika tentang Ibu Kota Negara Nusantara*. Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam Vol. 9 No. 1.
- Bappenas, 2021, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara*.
- Bappenas, 2023, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*
- Daru Trimustiko Sakti. Muhammad Efendy. Rahmida Erliyani. 2023. *Permasalahan Hukum Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Pembangunan Sarana Pendukung Ibu Kota Nusantara*. Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2.
- Desi Apriani. Arifin Bur. 2021. *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jurnal Bina Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2.
- Dewa Gede Atmaja. 2018. *"Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum"*. Jurnal Kertha Wicaksana. Volume 12. Nomor 2.
- Ervin Nugrohosudin. 2022. *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*. Jurnal Legislatif. Vol. 5 No. 2.
- Fahrul Fauzi. Suparjo Sujadi. 2023. *Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara*. Tunas Agraria Vol. 6 No. 3.
- Hairunnisa. Wisda Aprilia Syaka. 2022. *Analisis Komunikasi Politik dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota*

Berkelanjutan. Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 4 No. 1.

Heri Herdiansyah, 2020, *Paradoks Hak Menguasai Negara Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 171 PK/TUN/2016*, Indonesian Notary Vol/ 2 No. 3.

Johanes Cahyono. Jonathan. 2023. *Perpanjangan dan Pembaruan Hak Atas Tanah Bagi Investor di Ibu Kota Nusantara*. Jurnal Magister Hukum Argumentum Vol. 9 No. 2.

Librianto. Djumeno. Fauzi. 2023. *Granting of The Right of Building Over The Right of Management: Alternative Land Settlement For Retired Indonesia Navy Army In Pangkalan Jati Plot*. Jurnal Hukum To-Ra Vol. 9 No. 2.

M Rizki Nurdin. 2022. *Desentralisasi dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara*. Lex Renaissance Vol. 7 No. 3.

Maria S.W. Sumardjono dalam Tody Sasmita, et.al, 2014, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUU-X/2012; Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol. 01. No. 01

Mawardi. 2003. *Sistem Hukum Islam dan Anglo Saxon Kajian Perbandingan Pemikiran Al-Thufi dan Roscoe Pound*. Millah Vol. 2 No. 2.

Muhammad Adrian Rizaldi. Hamid Chalid. 2023. *Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Memberikan Persetujuan untuk Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dibuat Oleh Notaris*. UNES Law Review Vol. 6 No. 2.

Nabil Abduh Aqil. Asri Verauli Tampubolon. Jessica Armeis. 2022. *Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara*. Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1.

- Nugrohosudin. 2022. *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022*. Jurnal Legislatif Vol. 5 No. 2.
- Nurfaqih Irfani, 2020, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3
- Richard Jatimulya Alam Wibowo. 2022. *Konstitusionalitas Pengadaan Tanah di Ibu Kota Negara Baru di Bidang Pertanahan dalam Perspektif Reforma Agraria*. Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1.
- Rikardo Simamarta. 2023. *Tumpang Tindih Penguasaan Tanah di Wilayah Ibu Kota Negara "Nusantara"*. VeJ Vol. 9 No. 1.
- Sulasi Rongiyati. 2014. *Pemanfaatan Hak Pengelolaan Atas Tanah Oleh Pihak ketiga*. Negara Hukum Vol. 5 No. 1.
- Vice Admira Firnaherera. Adi Lazuardi. 2022. *Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Studi Kebijakan Publik Vol. 1 No. 1.
- Wibowo. 2022. *Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 2 No. 2.
- Zainal Arifin Hoesein. 2012. *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making On The Perspective Of Legal Reformation)*. Jurnal RechVinding Vol. 1. No. 3.

SUMBER INTERNET

Akses Internet di
<https://katadata.co.id/berita/internasional/63d7f84c88d4a/memahami-teori-kepentingan-roscoe-pound-lengkap>. diakses pada tanggal 03 April 2024 pukul 23.30 wita.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU No. 21/2023).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU No. 3/2022).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata / *Burgelijk Wetboek* (BW).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (PP No. 17/2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (PP No. 12/2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (PP No. 29/2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP No. 18/2021).

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (PERPRES No. 65/2022).

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 – 2042 (PERPRES No. 64/2022).

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (PERPRES No. 75/2024).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Permen ATR/BPN No. 18/2021).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara (PMK No. 53/2023).

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (PERKA OIKN No. 12/2023).